BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan bahwa selama ini sebagian besar aset tetap BUMN masih *undervalued*, karena dicatat berdasarkan nilai perolehan beberapa dekade yang lalu. Pencatatan nilai yang lebih rendah dari nilai pasar mengakiabtkan *leverage* BUMN menjadi lebih rendah dari yang semestinya[1]. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada perusahaan milik negara saja. Perusahaan-perusahaan milik swasta dan koperasi pun mengalami hal demikian.

Nilai aset tetap yang *undervalued* juga terjadi pada Koperasi Produksi Perkebunan Karet (KPPK) Wangunwatie yang terletak di Desa Sukwangun Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. KPPK Wangunwatie yang berdiri pada 2 Mei 1952 tercatat memiliki aset tetap per tahun 2017 sebesar Rp 2,6 Milyar[2]. Namun nilai ini tidak sebanding dengan nilai wajar dari aset tersebut pada periode sekarang yang mencapai nilai Rp 5 Milyar. Seperti yang dijelaskan dengan grafik sebagai berikut :

[1] Achmad Fauzi, *https://www.wartaekonomi.co.id/read77056/rini-revaluasi-aset-bumn-itu-perlu.html*, 21 Oktober 2015

[2] KPPK Wangunwatie, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas,tahun buku 2017, hlm. 20.

Gambar 1.1 Nilai Aset Tetap berdasarkan Pencatatan Koperasi dan Nilai Wajar (dalam ribuan)

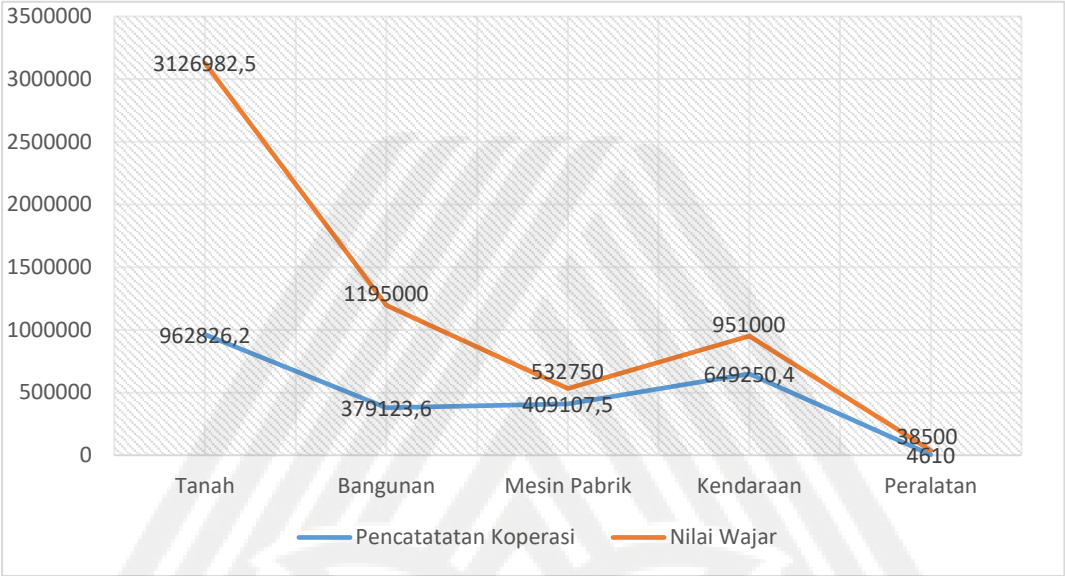

Sumber : Data yang diolah dari laporan keuangan koperasi dan berbagai sumber

Baridwan (2004:334) mengatakan untuk aktiva tetap apabila harga-harga sudah berubah dalam jumlah besar, maka rekening-rekening aktiva tetap uang memakai harga perolehan dimasa lalu sudah tidak menunjukkan keadaaan yang riil dari aktiva tersebut. Keadaan yang tidak riil dari aktiva tersebut tentu sangat masuk akal, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi yang terjadi di Indonesia. Diantaranya ketidakstabilan nilai rupiah yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi nilai aset, membuat perusahaan perlu memilih suatu kebijakan akuntansi agar dapat mencerminkan nilai sesungguhnya dari aset tetap yang dimilikinya.

Nilai aset tetap yang rendah berpengaruh kepada kinerja keuangan koperasi yang kurang baik dan akan mengurangi kemampuan koperasi dalam menarik modal asing karena rasio hutang terhadap aset (*debt to total assets ratio)* kurang baik. Rasio *debt to equity* dan *debt to assets* koperasi tahun 2014 s.d. 2017 masih menunjukan keadaan yang kurang memuaskan. Tercantum dalam Permen

Koperasi dan UMKM Nomor 06/Per./M.KUMKM/V/2006 bahwa rasio hutang terhadap aset adalah ≤70% dan rasio hutang terhadap modal sendiri adalah ≤40%. Rasio ini biasa dipakai untuk penilaian kreditur atau investor untuk melakukan keputusan investasi dan sebagainya. Ditunjukan pada grafik sebagai berikut :

Gambar 1.2 Kinerja Keuangan Koperasi 2013 s.d. 2017

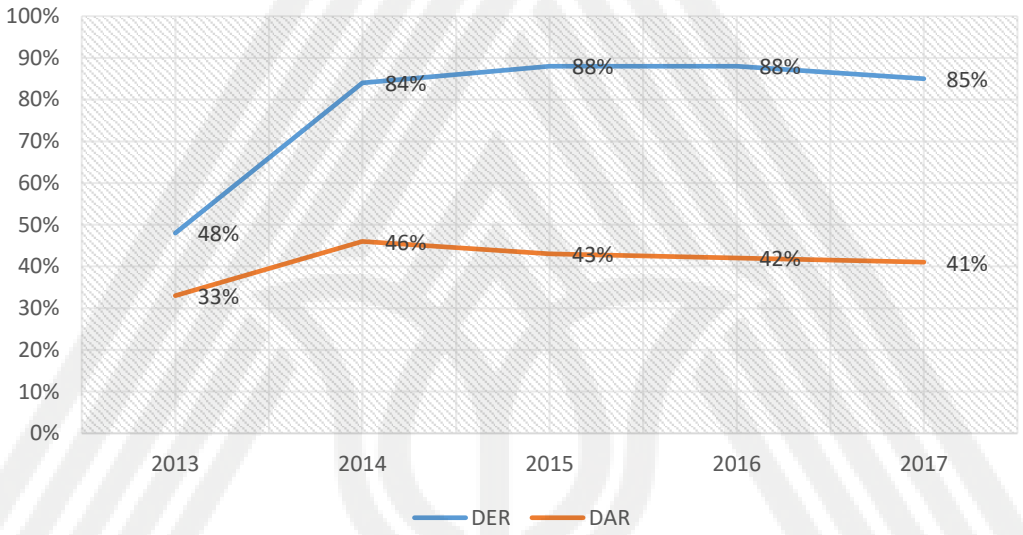

Sumber : Data yang diolah dari laporan keuangan koperasi

Sehubungan dengan itu, koperasi perlu menimbang dan mempertimbangkan salah satu kebijakan penilaian kembali aset tetap (revaluasi aset tetap) dalam upaya memperbaiki laporan posisi keuangan dan kinerja keuangannya disamping munculnya pajak final atas penilaian kembali aset tetap sebesar 10%.

Nidza dan Etna (2017:2) mengatakan revaluasi aset tetap dilakukan manajemen dengan mempertimbangkan perkembangan nilai dan harga aset tetap yang sudah tidak sesuai dengan nilai buku yang tertuang dalam laporan keuangan. Revaluasi aset tetap dengan mengikuti PSAK 16 dilakukan hanya untuk memperbaiki laporan posisi keuangan. Kebijakan ini dikatakan dapat

mencerminkan keadaaan yang sebenarnya dari aset, karena revaluasi aset tetap dalam praktiknya mencatat aset menggunakan nilai pasar dari aset tersebut, sehingga aset dinilai lebih relevan.

Salah satu modal asing koperasi yaitu dari bank. Koperasi hanya satu kali mendapatkan pinjaman dari bank yaitu tahun 2014 sebesar Rp 1,2 milyar dan tidak lagi mendapatkan pinjaman sampai dengan tahun 2017. Ditampilkan dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 1.3 Hutang Bank tahun 2014 s.d. 2017 (dalam jutaan)

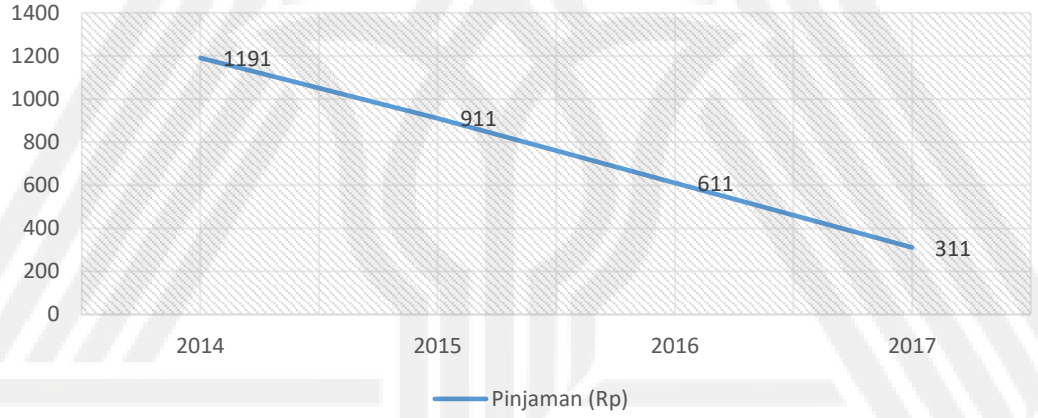

Sumber : Data yang diolah dari laporan keuangan koperasi

Dengan adanya penilaian kembali aset tetap maka rasio kecukupan modal koperasi atau *Capital Adequecy Ratio* juga akan meningkat. Artinya kemampuan koperasi dalam menarik pinjaman lebih besar dari kreditur atau investor akan meningkat. Menurut Franck Missonier-Piera (2005), mengenai motif melakukan revaluasi aset tetap: Analisis Empiris dengan Data Swiss, menerangkan sebagai berikut :

> ***These findings suggest that revaluation is used as a device to improve creditors' and foreign stakeholders' perceptions of the financial health of the firm and thereby improve the firm's borrowing capacity.***

Easton dkk. (1993) melaporkan bukti survei bahwa alasan utama Australia menilai kembali aset adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang benar dan adil. Analisis dapat dilihat sebagai pengujian motivasi ini. Survei juga menunjukkan bahwa motivasi paling umum kedua adalah untuk mempengaruhi rasio utang terhadap ekuitas, mungkin karena alasan-alasan kontrak utang.

Sebagai perlakuan akuntansi berkumpul melalui satu set standar, revaluasi aset tetap adalah salah satu topik yang paling kontroversial karena diperbolehkan di bawah IFRS dan tidak diizinkan di bawah beberapa GAAP nasional (Lopes et al., 2012). Menurut IFRS aset berwujud dan tidak berwujud dapat diukur dalam periode setelah pengakuan awal pada biaya atau pada nilai wajar. Model penilaian yang dipilih tergantung pada penilaian manajemen. Cara perusahaan menilai kembali asetnya tergantung pada keputusan, waktu, arah, dan masalah besarnya. Keputusan berkaitan dengan apakah perusahaan memilih untuk merevaluasi atau tidak; waktu berkaitan dengan perilaku perusahaan selama beberapa tahun mengenai revaluasi, masalah arah berkaitan dengan revaluasi ke atas atau ke bawah; dan besarnya terkait dengan revaluasi dampak terhadap laporan keuangan (Lin et al., 2000).

Tindakan penilaian kembali ini dilakukan karena aset tetap yang didasarkan pada harga perolehan *(historical cost),* sehingga dianggap kurang mencerminkan nilai atau potensi nyata yang dimiliki oleh perushaaan, sebagai

akibat adanya fluktuasi harga atau nilai tukar yang cukup tinggi (Waluyo; 2014: 191).

Waluyo (2014 : 156) mengatakan kembali bahwa pada kondisi perekonomian yang berfluktuasi, perusahaan perlu melakukan penyesuaian nilai aset tetap terhadap nilai pasar karen nilai buku tidak bisa mencerminkan harga pasar yang berlaku saat ini. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pada IFRS menggunakan basis revaluasi dan nilai wajar dalam menilai aset tetap melalui IAS 16 tentang *Property, Plant and equipment, IAS 38* tentang *Intangible Assets, IAS* 40 tentang Investment Property dan IAS 41 tentang *Agriculture* perlu diperhatikan bahwa nilai wajar tidak hanya pada standar Akuntansi Keuangan Tersebut tetapi juga pada standar lainnya.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penilaian kembali aset tetap terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dilakukan oleh Annisa Dwi Putri S, dkk. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2014. Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa revaluasi aset tetap berpengaruh 30,3% terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan *Debt to assets ratio,* sedangkan sisanya 77,4% meruapakan pengaruh faktor –faktor lain diluar variabel revaluasi aset tetap.

Tindakan penilaian kembali aset tetap ini pun tidak hanya berlaku pada perusahaan- perusahaan milik negara, tetapi juga berlaku pada koperasi dan badan usaha miliki swasta.

Sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK/03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap sebagai berikut :

> **"Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat bisa."**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian yang sama dengan tempat dan kondisi yang berbeda dan bisa menjadi pertimbangan koperasi apakah layak atau idak dilaukan penilaian kembali aset tetap atau tidak. Penelitian ini berjudul : "Dampak Penilaian Kembali Aset Tetap terhadap Kinerja Keuangan Koperasi. *(Studi Kasus pada Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie Desa Sukawangun Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya)."*

IKOPIN

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada latar belakang penelitian, peneliti merinci pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pencatatan aset tetap setelah pengukuran awal yang saat ini diterapkan di Koperasi Produksi Perkebunan Karet (KPPK) Wangunwatie.
2. Bagaimana hasil penilaian kembali aset tetap setelah pengukuran awal berdasarkan prinsip harga perolehan dan penyimpangan prinsip harga perolehan di Koperasi Produksi Perkebunan Karet (KPPK) Wangunwatie.
3. Bagaimana dampak penilaian kembali aset tetap terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Produksi Perkebunan Karet (KPPK) Wangunwatie.

IKOPIN

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu melakukan penilaian kembali aset tetap Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW) untuk mengetahui nilai aset tetapnya secara lebih realistis dan dampaknya terhadap beban pajak penghasilan badan koperasi.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mendeskripsikan pencatatan aset tetap setelah pengukuran awal yang saat ini diterapkan di Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie.
2. Menghitung dan mendeskripsikan hasil penilaian kembali aset tetap berdasarkan prinsip harga perolehan dan penyimpangan prinsip harga perolehan yang dimiliki Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie.
3. Menghitung dan mendeskripsikan hasil dari dampak penilaian kembali aset tetap terhadap kinerja keuangan Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie.

IKOPIN

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi aspek pengembangan ilmu dan aspek praktik dalam upaya mengembangkan Koperasi. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

1.4.1. Kegunaan Bagi Aspek Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu manajemen keuangan khususnya untuk materi penilaian kembali aset tetap (revaluasi) pada badan usaha koperasi dan mengenai kinerja koperasi.

1.4.2. Kegunaan Bagi Aspek Guna Laksana

Diharapkan dapat berguna bagi pengurus dan pengelola koperasi sebagai informasi atau masukan dalam menyusun laporan keuangan dan dalam mempertimbangkan dan menetapkan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Bagi peneliti lain, diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi, referensi dan perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

IKOPIN